



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT**

**Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analis Kinerja Pelayanan DP2KBP3A	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP2KBP3A	27
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DP2KBP3A	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan	43
BAB V PENUTUP	
5.1 Pengesahan.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan tahapan proses perencanaan pembangunan daerah yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Penyusunan Renja SKPD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) ini mengacu pada Renstra SKPD P2KBP3A Tahun ke-5. IKU RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023, Isu Strategis RPJMD Tanah Laut, Standar Pelayanan Minimal, Program Prioritas Nasional, Program Strategis Nasional, Program Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan, Tujuh Program Unggulan dan Tagline “Desa Dibina, Kota Ditata.

Rancangan awal Renja SKPD P2KBP3A Tahun 2023 berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rancangan awal Renja SKPD P2KBP3A Tahun 2023 di input melalui aplikasi SIPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
 21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan :

- a) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD P2KBP3A adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah di sahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada saat disusunnya Renja SKPD P2KBP3A Tahun 2023 ini, pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 baru akan di mulai sedangkan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 masih terkendala pada pandemi covid-19, sehingga capaian realisasi renja Tahun 2021 masih ada yang belum tercapai. Dalam konteks melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja ini juga dapat melihat pada realisasi sampai dengan akhir tahun 2021. Hal yang menjadi esensinya sejauh mana capaian sampai dengan tahun 2021 dan target apa yang akan dicapai pada tahun 2023, sehingga dapat direncanakan program/kegiatan untuk tahun 2023 dengan memperhatikan kedua aspek tersebut, disamping ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

Hasil kegiatan SKPD DP2KBP3A pada tahun 2021 umum telah dilaksanakan dengan optimal secara fisik realisasi yang dapat dicapai sebesar 82,47%. Beberapa capaian yang tahun 2021 yaitu :

- a. untuk Indikator TFR Kabupaten Tanah Laut ditargetkan sebesar 2.27% dan terealisasi sebesar 2.32%. Pada pengukuran Indikator TFR jika realisasi semakin rendah maka pencapaian kinerja semakin baik. Realisasi TFR Tahun 2021 sebesar 2,32 artinya masih belum mencapai target yang diharapkan atau baru tercapai sebesar 97,80% namun demikian dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2020 TFR 2,51 maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan capaian kearah yang baik.
- b. Untuk indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 di targetkan 68,56 terealisasi sebesar 70,68 atau capaian target 103,28% artinya telah melampaui dari target yang di tetapkan. Hal ini perlu di pertahankan dan juga ada beberapa kegiatan yang perlu ditingkatkan terutama dalam rangka melakukan perhitungan Anggaran Resposif Gender (ARG), pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan ini belum mendapatkan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

- c. Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak, indikator yang digunakan yaitu 700 skor (Madya) untuk capaian tahun 2021 masih berada pada 551 skor (pratama) sehingga masih belum mencapai target.

Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja DP2KBP3A Tahun 2021 diuraikan pada tabel tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2021. Sedangkan secara singkat beberapa hasil kegiatan utama tahun 2019 dan realisasi tahun 2021 sampai dengan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kabupaten Tanah Laut

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Sampai Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	9	10(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									
2 08										

2	08	03	2	01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%					100%				
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Korban kasus yang berhubungan dengan hukum - Jumlah korban yang di visum Rumah Sakit - Jumlah penyelesaian kasus kekerasan perempuan										
2	08	03	2	01	0											
2	08	03	2	01	2											
2	08	06	2	02	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	700 Skor	700	700	700	551	78.71	700 Skor			
					Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%									
2	08	06	2	02												
2	08	06	2	02	0											
2	08	06	2	02	2											
2	08	06	2	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Jumlah Peserta FAD										
2	08	06	2	02	0											
2	08	06	2	02	2											

2	14	01	2	06	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli			29 jenis	29 jenis	100%	25 jenis		
2	14	01	2	06	0	5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah pengadaan - Jumlah penyediaan barang cetakan			17391 Lembar 140 Cetak	17391 Lembar 140 Cetak	100%	17391 Lembar 140 Cetak		
2	14	01	2	06	0	6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar harian yang terbeli			700 Eksemplar	700 Eksemplar	100%	700 Eksemplar		
2	14	01	2	06	0	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama kegiatan rapat - Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			770 kotak 12 bulan	770 kotak 12 bulan	100%	440 kotak 12 bulan		
2	14	01	2	07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
2	14	01	2	07	0	5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah kursi rapat yang terbeli			32 Buah	32 Buah	100%	32 Buah		
2	14	01	2	07	1	1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang			5 Unit	5 Unit	100.00 %	5 Unit		

2	14	01	2	09	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah honorarium Pegawai Tidak Tetap yang terbayar - Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan roda 2 yang terpelihara selama 1 tahun - Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan roda 4 yang terpelihara selama 1 tahun			12 Bulan 69 Unit 8 Unit	12 Bulan 69 Unit 8 Unit	100%	12 Bulan 69 Unit 7 Unit		
2	14	01	2	09	1	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	81 Unit	17 Unit	15 Unit	88.00%	17 Unit			
2	14	02					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur	2,22	2,27	2,32	97,80	2,24			
2	14	02	2	01			Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan yang berwawasan berkependudukan dan alat ukurnya (IPBK)/Indeks Pembangunan Berwawasan	18,51 %							

2	14	03	2	01	03	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah jenis sarana KIE yang di distribusikan			701 Leaflet 180 Poster	0	0%	701 Leaflet 180 Poster		
2	14	03	2	01	04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media promosi dan KIE Program KKBPK melalui media cetak dan elektronik serta media luar ruang			4 Media	4 Media	100%	4 Media		
2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan yang berwawasan berkependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	18.51%							
2	14	03	2	02	04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Balai Penyuluhan KB Yang Mendapat ATK - Jumlah Kader PPKBD Yang Dibayar Honorarium Selama 12 Bulan - Jumlah Kader Sub PPKBD Yang Dibayar Honorarium Selama 12 Bulan 			11 balai 135 Orang 421 Orang	11 balai 135 Orang 421 Orang	100%	11 balai 135 Orang 421 Orang		

2	14	04						Angka Menurunnya Kelahiran Total (TFR) Per Wus	2,22	2,81	2,27	2,32	97,80	2,24		
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
2	14	04	2	01				Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%							
2	14	04	2	01				Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan		
2	14	04	2	01				Jumlah Pelaksanaan Ajang Kreatifitas Genre / PIK-R			1 Kegiatan	1 Kegiatan				
2	14	04	2	01				Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40		1 Kegiatan 4 kali, 1 orang	1 kegiatan 2 kali, 1 orang	100%, 50%, 100%	1 kegiatan 4 kali, 1 orang		
2	14	04	2	01				- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orientasi BKB - Jumlah Pembinaan / Monitoring / Evaluasi Program Serta Kegiatan Ketahanan Keluarga di 11 Kecamatan - Jumlah Non ASN/PTT Yang Dibayarkan Honorarium Selama 12 Bulan								

2	14	04	2	01	0	7	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orientasi UPPKS, - Jumlah Pembinaan / Monitoring / Evaluasi Program Serta Kegiatan Pemberdayaan Keluarga di 11 Kecamatan - Jumlah Non ASN/PTT Yang Dibayarkan Honorarium Selama 12 Bulan	1 kegiatan 3 kali 12 Bulan	1 kegiatan 3 kali 12 Bulan	100%, 100%, 100%	1 kegiatan 3 kali 12 Bulan		
---	----	----	---	----	---	---	---	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--	--

Pelatihan, 24 Agustus 2022

Kepala,



Ir. NOR HIDAYAT
NIP.19630824 199403 1 007

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pembinaan UPT Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari tabel T-C.30 dapat terlihat bahwa :

- a. untuk Indikator TFR Kabupaten Tanah Laut ditargetkan sebesar 2.27% dan terealisasi sebesar 2.32%. Pada pengukuran Indikator TFR jika realisasi semakin rendah maka pencapaian kinerja semakin baik. Realisasi TFR Tahun 2021 sebesar 2,32 artinya masih belum mencapai target yang diharapkan atau baru tercapai sebesar 97,80% namun demikian dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2020 TFR 2,51 maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan capaian kearah yang baik. Apabila di bandingkan dengan target Nasional 2,21

- b. Indikator Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) di targetkan sebesar 90% dan terealisasi 83,28% artinya target masih belum tercapai atau baru tercapai 92,53%
- c. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) di targetkan sebesar 9% dan terealisasi sebesar 8,56% Pada pengukuran Indikator mCPR jika realisasi semakin rendah maka pencapaian kinerja semakin baik, maka dapat diartikan bahwa pencapaian melebihi target yang diinginkan.
- d. Persentase ARG pada belanja langsung APBD pada indikator ini hasil masih belum memuaskan pada tahun 2021 disebabkan beberapa hal yaitu diantaranya : hasil ARG yang sudah terpilah hanya pada Dinas P2KBP3A, belum tersedianya tenaga fasilitator terlatih di Kabupaten Tanah Laut yang mampu mendampingi SKPD dalam perhitungan ARG di masing-masing SKPD, belum tersedianya anggaran untuk kegiatan penghitungan ARG.
- e. Persentase anak korban kekerasan yang di tangani tahun 2021 hanya sebesar 0,01658, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya 0,10017 artinya terjadi penurunan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 di bandingkan tahun sebelumnya, untuk kasus yang dilaporkan ke Dinas P2KBP3A semua kasus telah ditangani.
- f. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000) penduduk

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel T-C.30

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAPAIAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		IKK Hasil	2,33	2,30	2,27	2,24	2,22	2,51	2,32				
2	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		IKK Keluaran	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
3	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		IKK Keluaran	0	0	0	0	0		20,28	21,00	21,00		
4	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		IKK Keluaran	0	0	0	0	0		39	34	32		
5	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KBPK (advokasi dan KIE)		IKK Keluaran	0	0	0	0	0		69,6%	70%	80%		
6	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KBPK		IKK Keluaran	0	0	0	0	0		632	632	632		
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		IKK Hasil	65%	65%	65%	65%	65%	83,75%	83,27%	83,27%	83,27%		
8	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		IKK Keluaran	0	0	0	0	0	80%	80%	80%	80%		
9	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		IKK Keluaran	0	0	0	0	0		11,99%	11,99%	11,99%		

10	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPk yang efektif		IKK Keluaran	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	
11	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		IKK Keluaran	0	0	0	0	0	0	0	0	87%	87%	87%	
12	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		IKK Hasil	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	7,75%	8,59%	9,00%	9,00%	
13	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		IKK Keluaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3%	0,3%	0,3%	
14	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)		IKK Keluaran	0	0	0	0	0	0	0	0	87%	87%	87%	
15	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		IKK Hasil	0	0	0	0	0	0	0	15,04%				
16	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		IKK Keluaran	0	0	0	0	0	0	0	0	3 SKPD	4 SKPD	4 SKPD	
17	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		IKK Keluaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota		IKK Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0,10017%	0,0165%	0,0165%	0,0165%	
19	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		IKK Keluaran	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Media Massa	2 Media Massa	2 Media Massa	
20	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		IKK Keluaran	0	0	0	0	0	0	0	0	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	
21	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		IKK Keluaran	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	
22	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		IKK Keluaran	0	0	0	0	0	0	0	0	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk, dalam pencapaian target terdapat beberapa masalah yaitu :
 - a) Rendahnya kesadaran masyarakat pada PUS dalam ber KB
 - b) Peserta KB masih di dominasi perempuan
 - c) Tingginya pernikahan remaja (< 14 tahun, 15-19 tahun)
 - d) Rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), KB MKJP kurang diminati dan dipahami oleh masyarakat
 - e) Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun menggunakan alat kontrasepsi yang kurang efektif (Non MKJP).
 - f) Angka Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi diatas target yaitu 9%
2. Tingginya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun) dalam pencapaian target terdapat masalah pada Kepesertaan masyarakat dalam ber- KB belum optimal dengan akar masalah yaitu :
 - a) Eksternal
 - Penguatan advokasi dan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pelaksanaannya masih menemui permasalahan antara lain :
 - Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program Bangga Kencana, yaitu terkait kelembagaan , kebijakan, perencanaan
 - Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga yaitu TFR 2,32 tahun 2021 angka ini belum mencapai target yang diinginkan yaitu 2,27.
 - Pelaksanaan Advokasi dan KIE belum efektif ditandai dengan

pengetahuan masyarakat tentang KB dan alat kontrasepsi dan pasangan usia subur /PUS tidak diikuti dengan menjadi peserta KB.

- Peran tenaga lapangan KB dan bidan dalam konseling KB belum optimal
- Masih belum optimalnya penyampaian informasi mengenai program Bangga Kencana

b) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB

- Angka pemakaian kontrasepsi cara modern belum meningkat secara signifikan
- Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) cukup tinggi
- Penggunaan alat dan obat metode kontrasepsi jangka pendek (non MKJP) terus meningkat sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah

c) Pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga belum meningkat ditandai dengan 1) masih banyaknya perkawinan diusia muda 2. Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15 – 19 tahun cukup tinggi.

d) Pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga

- Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah
- Partisipasi dan pemahaman dan kesadaran keluarga / orang tua yang memiliki remaja masih rendah
- Kualitas hidup lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia belum optimal
- Kelompok kegiatan (Poktan) terdiri dari BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada

masyarakat akan pentingnya ber KB

- e) Faktor SDM yaitu terbatasnya Tenaga Penyuluh KB yang ada, seharusnya satu Penyuluh KB menangani satu desa namun kondisi saat ini satu Penyuluh KB menangani 3 sampai 4 Desa
 - f) Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan program Bangga Kencana belum optimal.
3. Belum Optimalnya Kesetaraan Gender dalam pencapaian target terdapat beberapa masalah yaitu : rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, tingginya persentase perempuan yang bekerja di sektor informal, tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dan tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan (termasuk perkawinan usia anak dan praktek-praktek berbahaya terhadap perempuan/anak perempuan), serta Belum tersedianya basis data akurat terkait dengan data terpilah atau data responsif gender dan anak untuk dipergunakan dalam perencanaan penganggaran yaitu Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
4. Belum tercapainya skor kota layak anak dalam pencapaian target terdapat beberapa masalah yaitu : rendahnya tingkat partisipasi Dunia usaha, lembaga masyarakat, termasuk perkawinan usia anak dan praktek-praktek berbahaya terhadap anak perempuan, belum semua sekolah dan puskesmas dan instansi pemerintah di desain ramah terhadap anak..

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C 32

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				8,225,032,998	Swakelola	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	IKM	83 Nilai	5,916,311,626	Swakelola	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	9,999,768	Swakelola	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	7 Dokumen	4,999,884	Swakelola	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4,999,884	Swakelola	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	5,034,134,018	Swakelola	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	5,029,134,298	Swakelola	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	4,999,720	Swakelola	

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	201,780,128	Swakelola
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	3,445,923	Swakelola
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan yang disediakan	3 Paket	61,414,910	Swakelola
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	13,059,295	Swakelola
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	3,000,000	Swakelola
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120,860,000	Swakelola
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	43,464,969	Swakelola
4.1	Pengadaan Mebel	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	14,982,559	Swakelola
4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	28,482,410	Swakelola
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	487,182,743	Swakelola

5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	66,000,000	Swakelola
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	4621,182,743	Swakelola
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	32 Unit	139,750,000	Swakelola
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	30,000,000	Swakelola
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit	100,000,000	Swakelola
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	9,750,000	Swakelola
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan yang berwawasan berkependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	1,56% 18,51%	88,343,648	Swakelola
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Pertemuan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Program KKBPK		18,730,250	Swakelola

1.1	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penguatan kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal	2 Dokumen	18,730,250	Swakelola
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Data Kependudukan yang di Bentuk	4 Buah	69,613,398	Swakelola
2.1	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah data Kependudukan di kampung KB untuk memperkuat Integritas Program Bangsa kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di sektor lain yang dibentuk	2 Unit	16,140,218	Swakelola
2.2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	11 Laporan	11,020,000	Swakelola
2.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	42,451,180	Swakelola
III	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan yang berwawasan berkependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	18,51%	1,936,761,460	Swakelola
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	57,480,000	Swakelola
1.1	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangun Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	57,480,000	Swakelola

2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pendayagunaan Petugas KB di Lini Lapangan	100%	1,512,320,000	Swakelola
2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	556 Orang	1,512,320,000	Swakelola
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Meningkatnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang Ber KB	90%	366,961,460	Swakelola
2.1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	751 Orang	343,609,020	Swakelola
2.2	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	15,505,000	Swakelola
2.3	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta hak-hak Reproduksi di fasilitas Kesehatan dan kelompok kegiatan	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	33 Orang	7,847,440	Swakelola
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan PUS ingin Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Anggota Keluarga UPPKS yang ber-KB	9% 87%	283,616,264	Swakelola
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	100%	283,616,264	Swakelola

1.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11 Unit	221,990,010	Swakelola
1.2	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	32,251,374	Swakelola
1.3	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	33 orang	14,687,440	Swakelola
1.4	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9 Laporan	142,387,201	Swakelola
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				725,152,109	
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (skor)	89,50 Nilai	554,789,671	Swakelola
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			54,799,790	
1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkatdaerah	54,799,790	Swakelola

2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kegiatan Penguatan dan Persentase Pemenuhan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	499,989,881	Swakelola
2.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	2.000 Orang	499,989,881	Swakelola
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (skor)	68,50 Nilai	33,126,140	Swakelola
1	Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9,143,600	Swakelola
1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkatdaerah	9,143,600	Swakelola
2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	100%	23,982,540	Swakelola
2.1	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Orang	23,982,540	Swakelola
VII	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (skor)	68,50 Nilai	91,398,340	Swakelola
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			91,398,340	Swakelola

1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	91,398,340	Swakelola
VIII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan perempuan dan Anak dari Tindakan kekerasan yang ditinjau lanjuti	100%	45.837,958	Swakelola
1	Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	45.837,958	Swakelola
1.1	Penyediaan layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	45.837,958	Swakelola

Pelatihari, 24 Agustus 2022

Kepala,



04 Ir. NOR HIDAYAT
NIP.19630824 199403 1 007

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu : (1). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.1.1 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Akhir tahun 2019 BKKBN mengemas dan memperkenalkan istilah Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangsa Kencana. Perubahan nama dari KKBPK menjadi Bangsa Kencana tersebut bertujuan untuk memudahkan penyebutan program, yang seringkali agak sulit untuk diucapkan. Peletakan kata Pembangunan Keluarga di depan menunjukkan bahwa BKKBN merupakan lembaga yang ingin memberikan manfaat kepada seluruh keluarga Indonesia. Selain itu, BKKBN harus dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik atau mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk "Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing", serta

mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; (1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan (2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.2
- 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP; (1) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan (2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Sedangkan pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP pada Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter.

Tahun 2021 sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana.

Tim Percepatan Penurunan Stunting juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

3.1.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) **Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan**, mencakup:
(a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.
- 2) **Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO**, mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas

SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO.

- 3) **Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya**, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan

arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Tanah Laut sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mewujudkan **3 (Misi)** yaitu :

1. **Misi ke 1 (Satu)** yaitu Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
2. **Misi ke 3 (Tiga)** yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
3. **Misi ke 5 (Lima)** yaitu Membangun Sinergitas yang Baik antar Tingkat Pemerintahan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah.

Pendanaan daerah untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut 2023.

- a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya yaitu :
 - 1) Pencapaian Visi dan Misi Bupati Tanah Laut
 - 2) IKU RPJMD Tahun 2018 - 2023
 - 3) Pencapaian SDGs
 - 4) Pengentasan kemiskinan
 - 5) Program Prioritas Nasional
 - 6) Program Strategis Nasional
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Tahun 2023 yaitu sebanyak 8 Program, 19 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan
- c. Tabel rencana Program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n Permendagri No. 13 Tahun 2006	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepermendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2						8,950,185,107						12,829,429,418	
2	14					8,225,032,988						11,198,500,000	
2	14	01			83 Nilai	5,916,311,626	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		83 Nilai	6,687,000,000	
2	14	01				9,999,768	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		100%	40,000,000.00	
2	14	01	01		7 Dokumen	4,999,884	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		7 Dokumen	20,000,000	

2	14	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peringkat Daerah	6 Laporan	4,999,884	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	2 Laporan	20,000,000
2	14	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5,034,134,018	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	100%	5,135,000,000
2	14	01	2	02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	5,029,134,298	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	27 Orang/bulan	5,130,000,000
2	14	01	2	02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	4,999,720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	5 Dokumen	5,000,000
0	0	1	1		Penyediaan jasa bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	201,780,128	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	100%	325,500,000.00
2	14	01	2	06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	3,445,923	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	4 Paket	6,000,000.00
2	14	01	2	06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan yang disediakan	3 Paket	61,414,910	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	3 Paket	90,000,000
2	14	01	2	06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	13,059,295	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	3 Paket	26,000,000

2	14	01	2	06'06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	3,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		2 Dokumen	3,500,000
2	14	01	2	06'09				Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120,860,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		12 Laporan	180,000,000
2	14	01	2.01	2.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	43,464,969	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		100%	190,000,000
2	14	01	2.01	2.07.05					Pengadaan Mebel	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	50 Unit	14,982,559	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		50 Unit	20,000,000
2	14	01	2.01	2.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	18 Unit	28,482,410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		18 Unit	120,000,000
2	14	01	2	08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	487,182,743	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		100%	540,000,000

2	14	01	2	08/02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	66,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	12 Laporan	70,000,000
2	14	01	2	08/04		Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	421,182,743	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	12 Laporan	470,000,000
2	14	01	2/09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	109 Unit	139,750,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	109 Unit	456,500,000
2	14	01	2/09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	30,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	1 Unit	30,000,000
2	14	01	2/09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	86 Unit	160,000,000
2	14	01	2/09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	9,750,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	23 Unit	16,500,000

2	14	02	2	01	Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan yang berwawasan berkependudukan dan alat ukurnya (IPBIX/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	1,56% 18,51%	88,343,648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	1,56% 18,51%	231,500,000
2	14	02	2	01.01	Advokasi dan KIE Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBP)	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta pertemuan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Program KBIPK		18,730,250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		66,000,000
2	14	02	2	01.05		Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen penguatan kerja sama Pelaksanaan pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal	2 Dokumen	18,730,250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	7 Dokumen	40,000,000
2	14	02	2	02.		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Data Kependudukan yang di Bentuk	4 Buah	69,613,398	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	4 Buah	165,500,000

2	14	02	2	02'08		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KBPK di Sektor Lain	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah data Kependudukan di kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di sektor lain yang dibentuk	2 Unit	16,140,218	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	2 Unit	25,000,000
2	14	02	2	02'09	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	11 Laporan	11,020,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	11 Laporan	33,000,000
2	14	02	2	02'13	Moniv dan Pendataan Keluarga	Pengolahan dan Pelaporan Data	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	42,451,180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	12 Dokumen	80,000,000
2	14	03			PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan yang berawasan berkependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berawasan Kependudukan)	18,51%	1,936,761,460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	18,51%	3,295,000,000

2	14	03	2	01	Pembinaan Masyarakat KB dan Kesehatan Reproduksi	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	57,480,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	100%	135,000,000
2	14	03	2	01.04		Promosi dan KIE Program KB/PK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	57,480,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	2 Dokumen	135,000,000
2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas KB/Petugas KB di Lini Lapangan (PKB/PLKB)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pendayagunaan Petugas KB di Lini Lapangan	100%	1,512,320,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	100%	2,650,000,000
2	14	03	2	04	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	556 Orang	1,512,320,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	556 Orang	2,650,000,000
2	14	03	2	03	Moniv Pelayanan KB dan Pengelolaan ALKON	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Meningkatnya pemahaman paaangan Usia Subur tentang Ber KB	90%	366,961,460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	90%	510,000,000

2	14	03	2	03.03		Peningkatan Kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	751 Orang	343,609,020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		1000 Orang	416,000,000
2	14	03	2	03.08		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringin dan Jejaringnya	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	15,505,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		1 Laporan	52,000,000
2	14	03	2	03.09		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta hak-hak Reproduksi dan Fasilitas Kesehatan dan kelompok kegiatan	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	33 Orang	7,847,440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		88 Orang	42,000,000
2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Cakupan PUS ingin Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) persentase Anggota Keluarga UPPKS yang ber- KB	9% 87%	283,616,264	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	0	9% 87%	985,000,000
2	14	04	2	01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	100%	283,616,264	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		100%	820,000,000

2	14	04	2	01'02		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11 Unit	221,990,010					11 Unit	230,000,000
2	14	04	2	01'03		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	32,251,374	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	0	3 Laporan	205,000,000
2	14	04	2	01'04		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	33 orang	14,687,440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		132 orang	240,000,000
2	14	04	2	01'07	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Laporan	14,687,440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		9 Laporan	145,000,000

2	08					URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				725,152,109							1,630,929,418
2	08	02				Program Penguatan Keterampilan PUG dan Anak	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan n, Semua Kelurahan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (skor)	89,50 Nilai	554,789,671	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	89,50 Nilai	845,929,418.00		
2	08	02	01	2	01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan n, Semua Kelurahan			54,799,790	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		150,000,000.00		
2	08	02	01.03	2	01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan n, Semua Kelurahan	Jumlah Peringkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Peringkat daerah	54,799,790	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	40 Peringkat daerah	150,000,000		
2	08	02	03	2	03	Penguatan dan Pembangunan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewena ngan Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan n, Semua Kelurahan	Kegiatan Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	499,989,881	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	100%	845,929,418.00		

2	08	02	2	03.02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat peningkatan Kapasitas	2.000 Orang	499,989,881	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	2.000 Orang	635,929,418
2	08	03			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (skor)	68,50 Nilai	33,126,140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	68,50 Nilai	425,000,000
2	08	03	2			Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan			9,143,600					315,000,000
2	08	03	2	03.03		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat daerah	9,143,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	25 Perangkat daerah	315,000,000
2	08	03	2	01		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	100%	23,982,540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	100%	110,000,000

					Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Orang	23,982,540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	10 Orang	110,000,000
2	08	06			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (skor)	68,50 Nilai	91,398,340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	68,50 Nilai	110,000,000
2	08	06	02	2	Pembiayaan dan Pemenuhan Hak Anak, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan			91,398,340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola		110,000,000
2	08	06	02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	91,398,340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	1 Dokumen	110,000,000
2	08	07			PROGRAM PERLUNDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab Tanah Laut Semua Kecamatan Kelurahan	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan perempuan dan Anak dari Tindakan kekerasan yang ditindak lanjut	100%	45,837,958	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Top down	Swakelola	100%	250,000,000

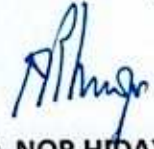
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan dan karyawan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dalam memantau dan mengarahkan perkembangan penyusunan dokumen Renja.

Pelaihari, 24 Agustus 2022

Kepala 

Ir. NOR HIDAYAT

NIP.19630824 199403 1 007